



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408837/2022**



DS:0400-4742-2801-1819

Revisi ke 03

Tanggal : 10 April 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 350.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	350.000.000
Rp.	350.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 350.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 350.000.000

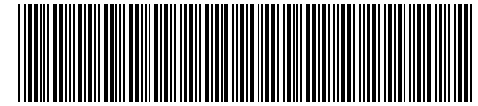
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi				350.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan				
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	54,00	Rekomendasi Kebijakan		301.934.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	54,00	Rekomendasi Kebijakan		301.934.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20,00	Orang		48.066.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20,00	Orang		48.066.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

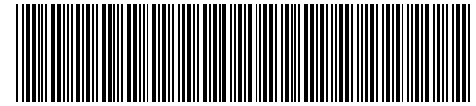
ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022

I B. SUMBER DANA



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

		Rp.	350.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2022					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	350.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408837	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	350.000	-	-	-	350.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	350.000	-	-	-	350.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	350.000	-	-	-	350.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	301.934	-	-	-	301.934	13 . 51	
01	RM	-	301.934	-	-	-	301.934	042@	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	48.066	-	-	-	48.066	13 . 51	
01	RM	-	48.066	-	-	-	48.066	042	
JUMLAH		-	350.000	-	-	-	350.000		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408837) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408837	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	11.845	12.000	28.660	31.060	35.280	41.595	49.152	29.485	34.656	32.830	43.437	350.000
		BELANJA BARANG	0	11.845	12.000	28.660	31.060	35.280	41.595	49.152	29.485	34.656	32.830	43.437	350.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	11.845	12.000	28.660	31.060	35.280	41.595	49.152	29.485	34.656	32.830	43.437	350.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	11.845	12.000	28.660	31.060	35.280	41.595	49.152	29.485	34.656	32.830	43.437	350.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022
IV A. B L O K I R**



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408837] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
408837	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 50.000 52 Belanja Barang Rp. 50.000		
013.08.BB 5250	Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 AA Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408837/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:0400-4742-2801-1819

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408837] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttt.
Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003